KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS

Uray Syafriansyah

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, E-mail : syafriansyah.uray@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas". Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Adapun skripsi ini diangkat berdasarkan dari permasalahan kinerja pegawai di instansi terkait, permasalahan-permasalahan tersebut adalah mengenai kuantitas kerja dan kualitas kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuantitas kerja pegawai masih belum optimal. Hal ini terlihat jelas dari beban kerja, dan penggunaan waktu kerja yang ada dirasakan belum cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Bidang Catatan Sipil. Selanjutnya kualitas kerja pegawai masih belum optimal dapat dilihat dari belum tercapainya sasaran atau tujuan instansi terkait, dan hasil kerja yang dihasilkan pegawai belum memuaskan mengenai Akta Kelahiran. Adapun keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki menjadi kendala dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Kata Kunci: kinerja pegawai, kuantitas kerja, kualitas kerja.

Abstract

This essay is titled "Performance of the Employees of Population and Civil Registry Office in Sambas Regency". This writing is supposed to know the performance of the employees of population and civil registry office in sambas regency. This essay is brought up based on performance problems of employees in involved instansion. The problems are about work quantity and quality. The results show that the work quantity still not optimal yet. It could be seen from work assessment, and the use in work time which is not enough to finish whole works on civil registry unit. Next, the quality of the employees which is not optimal yet, it could be seen from the target or purpose that is not reached yet, and the result of work is still not satisfying especially about birth certificate. There are also limitations of facilities and infrastructure which being assessment in finishing their works.
Keywords: employees' performance, work quantity, work quality.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Di lihat dari kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat kita sadari peran dan fungsi pemerintah begitu sangat strategis dalam penyelenggaraannya.

Dalam prakteknya dilapangan, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah dijelaskan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas.

Di era reformasi ini tuntutan akan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik untuk melaksanakan tugas semakin pesat. Sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan penjabaran dari Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2008, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah bertugas melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan tersebut, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam lingkup tugasnya terbagi dalam beberapa bidang sebagai berikut:

a) Bidang Kependudukan
   Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pendataan penduduk dan pendaftaran penduduk.
b) Bidang Catatan Sipil
   Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan dan pengelolaan dokumen catatan sipil.
c) Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan
   Mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengelolaan informasi dan perkembangan kependudukan.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga bidang tersebut, Bidang Catatan Sipil adalah bidang yang melakukan tugas pencatatan kelahiran penduduk. Seperti diketahui bahwa Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas masih tergolong rendah, yaitu dari 147.225 lembar blanko Akta Kelahiran yang disiapkan hanya terpakai 55.168 lembar atau baru 38% yang terealisasi berdasarkan data 2011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Berdasarkan LAKIP Tahun 2010 telah menetapkan sasaran tahunan. Adapun salah satu

sasarannya yaitu terciptanya penduduk yang mempunyai KK, KTP Nasional, dan Akta Catatan Sipil yang lebih meningkat. Peningkatan penduduk yang mempunyai akta catatan sipil yaitu salah satunya adalah kepemilikan Akta Kelahiran. Guna mewujudkannya, pencatatan kelahiran merupakan sebuah prioritas dari pemerintah Kabupaten Sambas. Pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran adalah sebagai bukti legalitas identitas diri dan status kewarganegaraan. Dengan Demikian, maka tugas pada Bidang Catatan Sipil khususnya pada Seksi Pencatatan dan Kelahiran dalam hal pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran juga bertambah.

Sesuai dengan informasi awal yang diperoleh penulis dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mendapatkan kendala-kendala internal dalam mencapai apa yang telah ditetapkan organisasi. Adapun kendala pertama yang dihadapi berupa dilihat dari pengoperasian kerjanya, masih terdapat pegawai di bidang catatan sipil yang belum terampil mengoperasikan perangkat kerjanya masing-masing, ke dua aldalah keterbatasan pegawai dalam mengatasi keterlambatan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, selanjutnya yang ketiga adalah dalam sehari berkas yang masuk untuk pembuatan Akta Kelahiran sebanyak 150 berkas. Akan tetapi tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dalam hari tersebut, sehingga terjadi penumpukan berkas. Adapun kendala yang terakhir yaitu berkas-berkas yang telah diselesaikan tidak sepenuhnya sempurna, masih banyak terdapat kesalahan dalam pengetikan identitas penduduk.

Dari tingkat masyarakat adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa kepemilikan Akta Kelahiran bukan sesuatu yang penting untuk dimiliki, sehingga masyarakat Kabupaten Sambas pada umumnya membuat Akta Kelahiran apabila sangat dibutuhkan. Melihat realitas di lapangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas memiliki peran yang sangat besar terhadap masyarakat tentang kepemilikan Akta Kelahiran. Adapun kesadaran masyarakat dalam melakukan pembuatan Akta Kelahiran tidak terlepas dari kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis menyimpulkan adanya permasalahan pada kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengajukan bentuk judul penelitian "Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas".

Berdasarkan latar belakang di atas mengingat banyaknya Tupoksi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan luasnya wilayah administratif pemerintahan di Kabupaten Sambas, ruang lingkup lokasi dibatasi pada Bidang Catatan Sipil dalam pembuatan Akta Kelahiran studi pada Desa Lorong Kecamatan Sambas.

Sementara itu, menurut Menurut Bernadin dan Russel untuk mengukur kinerja ditentukan oleh 6 kriteria dasar atau dimensi, antara lain: *Quality*, *Quantity*, *Timeliness*, *Cost-Effectiness*, *Need for Supervision*, dan *Interpersonal Impact*. Namun pada penelitian ini ruang lingkup permasalahan dibatasi pada *Quality* (kualitas kerja), dan *Quantity* (kuantitas kerja) karena teori yang digunakan relevan terhadap permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menyusun rumusan permasalahan Bagaimana kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan antara lain, sebagai berikut:

a) Ingin mengetahui kuantitas kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam pembuatan Akta Kelahiran.
b) Ingin mengetahui kualitas kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam pembuatan Akta Kelahiran.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi keilmuan dalam memahami dan menjelaskan tentang Kinerja Pegawai Negeri Sipil bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura khususnya pada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga yang terkait yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kinerja Pegawai

Harbani Pasolong (2008:175), menyatakan konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Banyak literatur yang membahas mengenai kinerja dan menimbulkan berbagai macam pengertian. Sebagaiman yang ditulis Mangkunegara (dalam Harbani Pasolong 2008:176), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Joko Widodo (dalam Harbani Pasolong 2008:175) mengatakan Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Lebih lanjut Joko Widodo berpendapat kinerja individu perorangan dan organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dari beberapa pengertian dari kinerja yang disampaikan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi tempat individu tersebut bekerja.

Menurut Bernadin dan Russel (dalam Sudarmanto 2009:12), menyampaikan ada 6 kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu:

1. *Quality*, terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam memenuhi maksud dan tujuan.
2. *Quantity*, terkait denagn satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.
3. *Timeliness*, terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk.
4. *Cost-Effectiness*, terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi.
5. *Need for Supervision*, terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan.
6. *Interpersonal Impact*, terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama diantara sesama pekerja dan anak buah.

Pengukuran kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Dengan melihat pengukuran kinerja tersebut dapat ditentukan dalam melihat kualitas atau mutu pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi dan dapat mengetahui kuantitas atau jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat diukur dengan:

1. Kualitas Kerja

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:57) bahwa Quality (kualitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut Wilson dan Heyel (1987:101) mengatakan bahwa Quality of work (kualitas kerja) menunjukkan sejauh mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Hal senanda disampaikan Hasibuan (2003:105) yaitu, Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan pekerjaan.

Dari pendapat diatas, jelas bahwa kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Yang dimaksud kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

2. Kuantitas Kerja

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003:56) bahwa Quantity (kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Sedangkan menurut Wilson dan Heyyel (1987:101) mengatakan bahwa *Quantity of* Work (kuantitas kerja) adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan

waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian dilanjutkan dengan Hasibuan (2003:105) yaitu, Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. Setiap organisasi akan selalu berusaha agar efektivitas kerja dari karyawannya dapat ditingkatkan.

Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala sosial tersebut, namun belum memadai (A. Tohardi 2008:108). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan mengenai kuantitas kerja dan kualitas kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Teknik penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive artinya pengambilan informan sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah informan disesuaikan dengan keperluan dengan prinsip ketercakupan informasi. Adapun yang menjadi informan:

1. Kepala Bidang Catatan Sipil
2. Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sambas
3. Kepala Desa Lorong
4. Tokoh Masyarakat Desa Lorong
5. Beberapa Masyarakat Desa Lorong

Objek penelitian berdasarkan judul penelitian yaitu "Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas".

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara tidak terstruktur

   Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono 2010:233). Pada saat dilaksanakan wawancara, pertanyaan yang berupa garis-garis besar tersebut akan dikembangkan sesuai kebutuhan di lapangan.

2. Dokumentasi

   Sugiyono (2010:240) menyatakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti merasa perlu melakukan pengumpulan dokumen sebagai data pendukung hasil penelitian dari wawancara.

Nasution (dalam Sugiyono 2010:245) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2010:246), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data dalam model ini yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi.

1. Reduksi Data
   Reduksi data dilakukan dengan melalui ringkasan data dan memfokuskan tema dan pola dasar dalam penelitian agar data yang diambil sesuai kebutuhan.
2. Display Data
   Setelah di lakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan data dalam sebuah pola hubungan, sehingga akan mempermudah penulis dalam memahami dan menganalisis data yang telah didapat. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.
3. Verifikasi
   Apabila kesimpulan awal masih bersifat sementara, penarikan kesimpulan pada akhir penelitian didukung dengan tahap reduksi data dan display data sehingga kesimpulan lebih kredibel.

Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Sugiyono (2010:274) menyatakan bahwa untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Adapun data dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari sumber-sumber data tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan pada kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas khususnya mengenai kualitas kerja, dan kuantitas kerja dalam pembuatan Akta Kelahiran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas khususnya mengenai kualitas kerja, dan kuantitas kerja dalam pembuatan Akta Kelahiran.

Mangkunegara (dalam Harbani Pasolong 2008:176), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, dalam melaksanakan pekerjaannya pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mengalami hambatan dalam mencapai hasil pekerjaan secara maksimal meliputi kuantitas kerja seperti jumlah kerja dan penggunaan waktu, selanjutnya kualitas kerja seperti ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Kedua hal tersebut dikatakan sebagai masalah dan memberikan pengaruh

yang besar dalam pencapaian kinerja pegawai yang baik.

1. Kuantitas Kerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Bernadin dan Russel menyatakan bahwa dimensi untuk mengukur kinerja salah satunya adalah *Quantity*, terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan. Kuantitas kerja tersebut meliputi jumlah kerja dan penggunaan waktu.

a) Jumlah Kerja/Beban Kerja

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas merupakan instansi pelaksana teknis dalam administrasi kependudukan.

Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Catatan Sipil pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012, didapatkan informasi saat wawancara bahwa bidang catatan sipil tidak hanya melaksanakan tugas sebagai pencatatan data seluruh penduduk yang tinggal disuatu daerah, akan tetapi juga dapat melakukan pencatatan penduduk yang melakukan perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran, pengesahan dan pengangkatan anak, serta pendataan penduduk. Adapun beberapa jenis Akta yang diberikan Bidang Catatan Sipil kepada masyarakat terdiri dari Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Pengakuan Anak.

Dari penjelasan di atas maka akan sangat perlu sekali adanya sebuah akta yang nantinya akan menjadi data otentik bahwa suatu peristiwa tersebut adalah sah dimata hukum. Selanjutnya penulis melakukan wawancara lebih lanjut kepada Kepala Bidang Catatan Sipil, beliau mengatakan:

> *"Salah satu bagian tugas dari Seksi Kelahiran Kematian adalah mengenai* sebagai bukti bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat. *pembuatan Akta Kelahiran. Berkas yang masuk dari pemohon untuk pembuatan Akta Kelahiran dalam sehari bisa mencapai 150 berkas permohonan. Sementara dalam sehari Akta terselesaikan tidak mencapai apa yang diajukan dalam sehari. Jika dibiarkan terus menerus akan terjadi penumpukan berkas. Sejauh ini pegawai yang berada pada Bidang Catatan Sipil bekerja tidak terikat dengan tupoksi yang ada. Adapun untuk mengatasinya semua pegawai yang berada Bidang Catatan Sipil dilibatkan dalam proses pembuatan Akta Kelahiran. Kalau hanya mengandalkan pegawai pada Seksi Kelahiran dan Kematian pastinya akan kewalahan karena hanya 4 pegawai saja". (Wawancara, Hari Rabu Tanggal 25 Juli 2012).*

Dengan demikian dilihat dari jumlah pekerjaannya bidang catatan sipil memiliki peran yang begitu besar terhadap keberhasilan terciptanya tertib administrasi kependudukan. Secara teknisnya pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran berada dibawah Seksi Kelahiran dan Kematian. Melihat kondisi yang ada pada bidang catatan sipil dimana jumlah pegawai dengan beban kerjanya tidak sebanding, sehingga akan dapat berdampak terhadap adanya pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

b) Penggunaan Waktu

Willson dan Heyyel menyatakan bahwa kuantitas kerja ditentukan pada penggunaan waktu yang berarti banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Ketepatan waktu penyelesaian tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat

Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Catatan Sipil pada

hari rabu tanggal 25 Juli 2012, dikatakan bahwa

> *"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berusaha melaksanakan pelayanan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan (Perda), yaitu waktu penyelesaian Akta Kelahiran paling lambat 14 hari, asalkan persyaratan yang telah ditetapkan lengkap".*

Dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, keberadaan waktu yang tersedia menjadi sesuatu yang penting terhadap pelaksanaan keseluruhan dari kegiatan yang harus diselenggarakan oleh instansi tersebut. Idealnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tupoksinya pastinya mengharapkan tercapainya apa yang telah ditetapkan sebelumnya dari organisasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012, dikatakan bahwa:

> *"Dengan melihat kondisi yang ada, supaya tidak terjadi penumpukan berkas dan menghindari keterlambatan penyelesaian, terjadi rangkap tugas pada Bidang Catatan Sipil yang mana demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan Akta Kelahiran". (Wawancara, Hari Rabu Tanggal 25 Juli 2012.)*

Hasil wawancara di atas memperlihatkan adanya upaya yang dilakukan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk menghindari penumpukan dan keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaanya. Akan tetapi apabila kita lihat dari ketentuan tugas dan fungsi masing-masing dari pegawai yang ada, tentunya hal ini membawa dampak yang tidak baik terhadap Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

2. Kualitas Kerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas

Menurut Bernadin dan Russel dimensi untuk mengukur kinerja adalah dengan *Quality*, terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam memenuhi maksud dan tujuan. Sementara menurut Dharma bahwa untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya salah satunya adalah kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. Kualitas kerja tersebut meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian.

a) Ketepatan

Willson dan Heyyel menyatakan bahwa kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan. Ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan LAKIP Tahun 2010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah menetapkan sasaran tahunan. Salah satu sasarannya yaitu terciptanya penduduk yang mempunyai KK, KTP Nasional, dan Akta Catatan Sipil yang lebih meningkat. Peningkatan penduduk yang mempunyai Akta Catatan Sipil yaitu salah satunya adalah kepemilikan Akta Kelahiran.

Ketika ditanyakan mengenai sasaran tersebut terutama mengenai kepemilikan Akta Kelahiran, Kepala Bidang Catatan Sipil mengatakan bahwa untuk mengharuskan setiap masyarakat memiliki Akta Kelahiran adalah sebuah hal yang tidak mudah. Mengingat sebagian besar anggapan masyarakat

Kabupaten Sambas bahwa Akta Kelahiran merupakan sesuatu hal yang tidak penting. Masyarakat pada umumnya membuat Akta Kelahiran apabila memang sangat diperlukan seperti terdapat permasalahan yang memerlukan Akta Kelahiran misalnya untuk keperluan sekolah, membuat paspor, dan melamar pekerjaan.

Dilanjutkan dengan pernyataan dari salah satu masyarakat dari Desa Lorong Kecamatan Sambas yang melakukan pembuatan Akta Kelahiran yaitu Bapak Safriandi menyatakan bahwa:

> *"Saya buat Akta Kelahiran untuk keperluan pembuatan paspor, karena salah satu syarat pembuatan paspor harus punya Akta Kelahiran. Kalau tanpa Akta Kelahiran pihak Imigrasi tidak mau memproses paspor yang saya buat". (Wawancara, Hari Senin Tanggal 30 Juli 2012).*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012, bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupten Sambas untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat telah melakukan penyebaran surat edaran dan penyuluhan kepada masyarakat ditingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sambas. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang Akta Kelahiran di 19 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupten Sambas.

Berkaitan dengan Akta Kelahiran, didapatkan informasi dari hasil wawancara pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012 dengan Kepala Bidang Catatan Sipil, dikatakan bahwa penerbitan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2011 jumlah blanko yang terpakai hanya sebanyak 54.816 blanko. Sementara jumlah blanko Akta Kelahiran yang tersedia sebanyak 147.225 blangko.

Dengan demikian target yang ditetapkan melalui sasaran yang tercantum di dalam LAKIP 2010 Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dirasakan jauh dari apa yang telah diharapkan oleh Dinas tersebut. Sehingga Dinas terkait masih perlu melakukan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan angka kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas. Melihat luasnya wilayah administratif pemerintahan yaitu terdiri dari 19 kecamatan dan 194 desa seharusnya penyuluhan dilakukan bukan hanya pada tingkat kecamatan saja, seharusnya pelaksanaan penyuluhan tentang Akta Kelahiran untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran yang menjadi jaminan hukum pada masyarakat Kabupaten Sambas sosialisasi yang dilakukan haruslah secara intensif kepada semua lapisan masyarakat.

b) Kelengkapan

Willson dan Heyyel menyatakan bahwa kualitas kerja dapat diukur dengan kelengkapan, yaitu kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012, bahwa penerbitan pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2011 jumlah blanko yang rusak sebanyak 352 blanko. Kerusakan tersebut biasanya disebabkan kesalahan pegawai dalam pengisian identitas masyarakat yang membuat Akta Kelahiran seperti salah dalam penulisan dan pencantuman nama anak, nama orang tua, dan tanggal lahir.

Banyaknya jumlah blanko Akta Kelahiran

yang rusak pada saat pembuatan Akta Kelahiran menunjukkan ketidaktelitian pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas khususnya pada Bidang Catatan Sipil dalam pembuatan Akta Kelahiran. Adapun hal ini di perkuat dengan pernyataan dari Kepala Desa Lorong Kecamatan Sambas, informasi ini penulis dapatkan pada saat wawancara. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Lorong Kecamatan Sambas:

> *"Seperti biasanya Desa Lorong membuatkan surat pengantar untuk warga yang ingin mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, sebelumnya warga harus mengisi formulir yang telah kita sediakan. Dilanjutkan pengesahan ke pihak Kecamatan Sambas, barulah nanti pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil memproses lebih lanjut. Baru-baru ini terjadi beberapa kesalahan pengetikan dalam penerbitan akta kelahiran untuk warga saya, nama orang tua salah, nama anak salah, padahal di surat permohonan sudah sesuai. Sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut". (Wawancara, Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2012).*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012, didapatkan informasi bahwa sejak tahun 2008 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan diberlakukannya SIAK dalam proses pembuatan Akta Kelahiran agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam pengolahan data lebih mudah, efisien dan pelayanan publik menjadi lebih baik. Adapun penerapannya menggunakan sistem komputerisasi.

Dengan demikian, adanya SIAK diharapkan tertib administrasi dapat segera terwujud, sehingga dengan terciptanya tertib administrasi pemerintah dapat memenuhi hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat. Diperlukan ketelitian kerja dari pegawai agar bisa mengoperasikan sistem SIAK ini. Adapun ketelitian kerja dalam menggunakan sistem komputerisasi dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan dalam penerbitan Akta Kelahiran.

c) Kerapian

Kerapian disini memiliki pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya prosedur yang di terapkan memiliki kesederhanaan dan kemudahan dalam pembuatan Akta Kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam hal ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya yang mana sebagai instansi pemerintahan yang melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kualitas kerja dapat dilihat berdasarkan kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaanyan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012, didapatkan informasi bahwa alur atau prosedur yang kita lakukan untuk pembuatan Akta Kelahiran adalah adanya pengajuan dari masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dilengkapi dengan surat keterangan lahir dari Rumah Sakit atau Puskesmas, surat pengantar dari desa dan kecamatan

sehingga Akta Kelahiran yang diajukan bisa diproses.

Selanjutnya berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak kecamatan, yaitu Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sambas. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sambas:

> *"Kalau dalam proses penerbitan sebuah Akta Kelahiran pihak Kecamatan Sambas pastinya mengikuti prosedur yang telah ada, karena kalau tanpa pengesahan dari pihak Kecamatan Sambas berkas yang masuk ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan ditolak. Selain itu berkas yang masuk ke Kecamatan Sambas, kita periksa kembali untuk memastikan kelangkapan persyaratan yang telah di tetapkan dilanjutkan dengan melakukan register oleh pihak Kecamtan Sambas". (Wawancara, Hari Jum'at Tanggal 27 Juli 2012).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa warga yang ingin melakukan pembuatan Akta Kelahiran dimulai dari desa dengan melakukan pengisian formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, dilanjutkan ke kecamatan untuk dilakukan pengesahan dan register yang dilakukan oleh pihak kecamatan, selanjutnya dilakukan register di kabupaten yaitu pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk diproses penerbitan sebuah Akta Kelahiran. Ini membuktikan bahwa masyarakat yang melakukan pembuatan Akta Kelahiran sudah melalui prosedur yang sesuai dan jelas.

Akan tetapi keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang diterapkan tentunya tidak terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam rangka untuk mendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap program kerjanya adapun sarana dan prasarana yang dimiliki sangat diperlukan untuk mendukung segera proses kerjanya.

Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012, bahwa sejak resmi terpisah dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2000, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas belum mempunyai gedung sendiri. Adapun ruang kerja Kasi Kelahiran dan Kematian dan Kabid Catatan Sipil tidak memiliki ruangan sendiri melainkan menyatu dengan ruang pelayanan. Antara ruang tunggu dan ruang kerja hanya dibatasi dengan penyekat setinggi 1 meter. Sehingga keterbatasan tersebut banyak masyarakat yang menunggu di lorong yang ada di luar kantor.

Dilanjutkan dengan pernyataan dari salah satu masyarakat dari Desa Lorong Kecamatan Sambas yang melakukan pembuatan Akta Kelahiran yaitu Bapak Safriandi menyatakan bahwa:

> *"Kondisi yang saya lihat pada saat saya buat Akta Kelahiran tempat pelayanan tidak dilengkapi nomor antrian, hanya datang ke loket pendaftaran sementara banyak masyarakat yang saya lihat melakukan pembuatan Akta Kelahiran. Ini menyebabkan antrian tidak tertib pada saat pengambilan Akta Kelahiran. Belum lagi ruang tunggu hanya ada di lorong jalan gedung sementara masyarakat yang lain ramai, sehingga kondisi yang ada membuat kita tidak nyaman". (Wawancara, Hari Senin Tanggal 30 Juli 2012).*

Dengan demikian bahwa pelayanan yang

diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dilaksanakan dengan keterbatasan yang ada, dalam arti semua pelaksanaan pendaftaran sampai penyelesaian Akta Kelahiran dilakukan oleh masyarakat dalam satu ruangan yang sempit. Penyusunan letak sarana dan prasarana yang digunakan pada setiap proses pelayanan tidak teratur sehingga ruangan penuh dengan pegawai dan masyarakat yang berada pada ruangan yang sama. Adapun masyarakat yang datang untuk menerima pelayanan berkeliaran di ruang kerja. Bisa kita rasakan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tiap harinya pada saat jam kerja mengingat kondisi yang ada tidak memenuhi standar.

Dilihat dari pembahasan tentang prosedur dalam peningkatan tugas dan fungsinya maka dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sangat memerlukan sarana dan prasarana untuk mendukung segala proses administrasi Akta Kelahiran. Sehingga segala sesuatu apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat pun akan terhambat.

D. SIMPULAN DAN KETERBATASAN STUDI

1. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

a) Jumlah kerja/beban kerja yang tinggi pada Bidang Catatan Sipil berdampak terhadap tertundanya sejumlah pekerjaan yang dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan penggunaan waktu kerja yang ada dirasakan belum cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Bidang Catatan Sipil. Sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

b) Hasil kerja yang dihasilkan belum memuaskan dapat dilihat dari ketelitian pegawai mengenai pembuatan Akta Kelahiran dan belum tercapainya sasaran atau tujuan instansi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran. Adapun keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki menjadi kendala dalam mencapainya.

2. Keterbatasn Studi

Selama melakukan penelitian terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk kekurangan dan kelemahan yang dialami penulis ketika berada di lapangan maupun ketika dalam penulisan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagai berikut:

a) Keterbatasan waktu penelitian karena penulis hanya diberikan waktu kurang lebih 3 minggu dalam penelitian, waktu yang sangat singkat untuk penelitian kualitatif sehingga penulis tidak mendapatkan waktu yang lebih untuk mendalami permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dirasakan kurang maksimal dalam menggali informasi.

b) Kurangnya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang ada hal ini dikarenakan adanya perasaan takut kepada atasan apabila memberikan penilaian yang negatif. Serta adanya kecurigaan karena khawatir penulis akan menulis mengenai kejelekan-kejelekan instansi sehingga penulis harus lebih keras menggali informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

c) Beberapa informan terkesan kurang serius dan memuaskan dalam memberikan jawaban

mengenai informasi yang diberikan terhadap permasalahan yang diteliti.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang telah menerima peneliti untuk melakukan penelitian dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan dengan baik.
2. Masyarakat Kabupaten Sambas yang melakukan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang telah meluangkan waktunya untuk penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

------. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi.* Bandung: Alfabeta.

Wungu dan Brotoharjo. 2003. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda Dengan Merit Sistem.* Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

Dokumen Resmi:

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2010.

Rujukan Elektronik:

http://ribuanpengunjung.wordpress.com/page/9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email :jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai *sivitas* akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : URAY SYAFRIANSYAH

NIM / Periode Lulus : E42008001 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : syafriansyah.uray@yahoo.com / 085234168000

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui unutuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KINERJA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal 8/1/2013

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP . 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Januari 2013

(URAY SYAFRIANSYAH)